

PERAN CINA MEMAJUKAN PEREKONOMIAN KAMBOJA

Arya Bayu Anggara

(arya.bayu0179@student.unri.ac.id)

Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si

(ahmad.jamaan@lecturer.unri.ac.id)

**Bibliografi: 6 Jurnal, 1 Buku, 3 Tesis dan Disertasi,
1 Working Paper, 1 Situs Daring**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau Kampus Bina Widya, Jl. HR Soebrantas Km 12,5

Simp. Baru Pekanbaru 28293

Abstract

China has become a country with a large economic power since the reopening of its economy in the 1980s. By capitalizing on this economic strength, China gradually became one of the countries with strong influence, and utilized this economic strength as an instrument for establishing relations with foreign countries. Cambodia, which is in the Southeast Asia region, is one of the countries that gets a lot of economic assistance from China, and has good relations with China itself. This study aims to understand the role of China in advancing the Cambodian economy.

This study used qualitative research methods. The data contained in the results of this research are processed from various journals, theses and dissertations, books, and several online articles.

China provides a great deal of economic aid and political assistance to Cambodia. China is also one of the countries that has pushed for reconciliation in Cambodia after the civil war. In addition, China became a country that continued to provide economic assistance to Cambodia, when Western countries decided to temporarily suspend economic assistance to Cambodia due to security issues. From a political perspective, Cambodia provides the assistance China needs in dealing with the South China Sea problems with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries. Cambodia's big role in supporting China's resolution on the South China Sea makes ASEAN fail to come up with a joint resolution against China.

Keywords: China, Cambodia, role, economic assistance, South China Sea, ASEAN

Pendahuluan

Cina adalah salah satu mitra dagang yang penting bagi Kamboja. Hubungan yang terjalin baik antara Kamboja – Cina disebabkan oleh berbagai pertolongan perekonomian yang diberikan oleh Cina kepada Kamboja. Di dalam prosesnya, bantuan-bantuan perekonomian tersebut menyebabkan Kamboja menempatkan Cina di posisi yang penting sebagai mitra utama bagi negara tersebut. Dalam hal ini, kebangkitan perekonomian Cina juga merupakan salah satu pemantik yang penting di dalam sejarah antara hubungan Kamboja – Cina. Kebangkitan perekonomian Cina adalah tonggak awal bagi Cina untuk bisa menyalurkan berbagai bantuan ekonomi ke berbagai negara, termasuk Kamboja, untuk mendapatkan dukungan.

Pengembangan dari tulisan ini menyesuaikan dengan ide-ide yang telah dijelaskan di alinea sebelumnya. Dengan demikian, pengembangan tersebut meliputi: (A) Kebangkitan dan Perkembangan Perekonomian Cina; (B) Hubungan Diplomasi dan Ekonomi antara Kamboja dengan Cina; dan (C) Pendekatan Kamboja – Cina Secara Politik.

A. Kebangkitan dan Perkembangan Perekonomian Cina

1. Reformasi Perekonomian Cina

Keputusan Cina untuk membuka perekonomiannya di akhir tahun 1980-an menjadi awalan bagi pertumbuhan ekonomi Cina yang besar di dekade-dekade setelahnya. Dengan pembukaan perekonomian, Cina membuka jalur bagi masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI), dorongan importasi modal dan teknologi yang dibutuhkan, dan pembukaan pintu impor bagi komoditas internasional. Beberapa

kebijakan tersebut menyebabkan keadaan pasar domestik Cina menjadi lebih kompetitif.

Cina merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang pesat. Semenjak melaksanakan reformasi perekonomian di masa Den Xiaoping, Cina menjadi salah satu negara dengan pencapaian ekonomi terbesar. Pertumbuhan ekonomi Cina mencapai angka rerata 9.8 persen per tahun dalam rentang tahun 1978 hingga tahun 2013. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, Cina berhasil menggandakan tingkat penghasilannya setiap tujuh tahun.¹ Sebagai implikasinya, Cina berhasil menjadikan lima ratus juta penduduknya keluar dari zona kemiskinan.

Salah satu dampak dari pertumbuhan ekonomi yang masif di Cina, yaitu tingkat urbanisasi yang masif. Dari tahun 1978 hingga tahun 2012, tingkat urbanisasi mengalami peningkatan dari 17.9 persen menjadi 52.6 persen.² Dengan angka urbanisasi yang tinggi, maka Cina mendapatkan momentum untuk melaksanakan industrialisasi dalam skala besar.

Perubahan sistem perekonomian juga menjadi salah satu faktor dari pertumbuhan perekonomian masif Cina. Bank Dunia, seperti yang dikutip oleh Msingathi, menjelaskan bahwa perubahan sistem perekonomian terpusat menjadi sistem perekonomian pasar adalah faktor yang menjadikan pertumbuhan perekonomian Cina berada dalam skala yang masif.³ Pengurangan jumlah penduduk miskin

¹ Msingathi, S. 2016, *Determinants of Economic Growth In China: 1978-2013*, Master, Port Elizabeth: Nelson Mandela Metropolitan University, hlm 53

² *ibid*, hlm 54

³ *ibid*, hlm 59

menjadi salah satu pertimbangan dari pandangan tersebut. Selain itu, Cina juga dipandang sukses dalam menyukseskan program *Millenium Development Goals* disebabkan oleh tingkat pertumbuhan perekonomian yang masif ini.⁴

Perencanaan perekonomian menjadi faktor lain dari pertumbuhan perekonomian Cina yang masif. Dalam pelaksanaan perencanaan perekonomian di Cina, program *rencana lima tahun* menjadi program utama. Program *rencana lima tahun* melibatkan semua aktor yang terdapat di Cina agar mencapai beberapa tujuan tertentu. Dalam hal ini, keberadaan sebuah negara yang kuat mutlak perlu.⁵ Peran negara adalah mengawasi dan memberi arahan kepada setiap aktor yang terlibat agar tetap menjalankan program sesuai dengan tujuan.

2. Integrasi Cina ke World Trade Organisation

Cina mengalami pertumbuhan perekonomian yang besar di rentang tahun 1998 hingga tahun 2008. Salah satu faktor yang memengaruhi, yaitu bergabungnya Cina ke WTO.⁶ Selama rentang tahun 1998 hingga tahun 2008, Cina menurunkan nilai *tariff* yang diterapkan ke berbagai komoditas perdagangan. Penurunan nilai *tariff* dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Bergabungnya Cina ke WTO diikuti dengan beberapa penyesuaian kebijakan. Salah satu yang ditekankan adalah komitmen untuk menghindari kegiatan *dumping*. Cina melakukan penyesuaian yang dimaksud. Cina

menerbitkan peraturan tentang posisi Cina dalam kegiatan melawan *dumping*. Kebijakan dalam upaya melawan tindakan *dumping* disebut dengan *Anti Dumping* (Disingkat AD).

Kebijakan *Anti-Dumping* (AD) dapat dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, penetapan AD merupakan upaya dari suatu negara untuk memaksa negara lain dalam mengimplementasikan kesepakatan yang tertuang dalam *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (GATT).⁷ Salah satu poin dari GATT, yaitu pelarangan bagi negara-negara yang terikat dengannya untuk melakukan tindakan *dumping*. Kedua, penetapan AD juga dipandang sebagai upaya sebuah negara untuk bersikap proteksionis terhadap ancaman masuknya arus komoditas dari negara lain.⁸ Dengan kata lain, AD dapat dimanfaatkan oleh negara-negara, baik dalam upaya liberalisasi maupun dalam upaya proteksionisme perdagangan.

Cina adalah salah satu negara dengan total pengaduan AD terbesar di dunia. Negara-negara yang dijadikan sasaran oleh Cina dalam penerapan AD sebagian besar adalah negara-negara berkembang. Dalam hal ini, Cina dipandang melakukan tindakan *retaliation*.⁹ Dalam kebijakan luar negeri Cina sendiri terhadap AD, Cina tegas menjelaskan bahwa tindakan *retaliation* diperlukan jika ada negara yang terlebih dahulu melakukan tindakan serupa kepada Cina.

Cina adalah satu-satunya negara yang secara eksplisit menjelaskan

⁴ *Loc.cit*

⁵ *Loc.cit*

⁶ Yuhang, P. 2018, *Trade Openness, Polution, and Growth: Evidence from China, 1998-2008*, Master, Hong Kong: Hong Kong University of Science and Technology, hlm 5

⁷ Marcelo Alejandro Sarzosa, L. 2012, *Dumping And A State Economy: Is China's Anti-Dumping Retaliation Is Justified Under The WTO Framework?*, Master, Santiago: Universidad de Chile, hlm 7

⁸ *Loc.cit*

⁹ *ibid*, hlm 8

tindakan *retaliatory* dalam masalah AD.¹⁰ Dalam hal ini, Cina juga merupakan negara yang banyak dijadikan pihak yang dituduh melakukan *dumping*. Beberapa pengguna AD terbanyak terhadap Cina, yaitu AS dan EU. Dalam hal ini, Cina juga melakukan tindakan pelaporan balik terhadap pihak-pihak yang melakukan AD terhadap dirinya.

Cina menjadi sasaran utama dari penerapan AD bagi beberapa negara semenjak proses bergabungnya Cina dengan WTO. Dari tahun 1997 hingga tahun 2010, terdapat 825 kasus AD yang diarahkan kepada Cina.¹¹ Salah satu alasan dari pertumbuhan aduan AD terhadap Cina, yaitu tingkat pertumbuhan ekspornya yang masif.

3. Peran Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi Cina

FDI merupakan salah satu variabel perekonomian yang berdampak positif dari kebijakan pembukaan perekonomian oleh Cina. Di tahun 2016, Cina berhasil mendapatkan nilai FDI sebesar 1.35 triliun Dollar. Peran dari FDI ini penting bagi perkembangan perekonomian Cina. Pengalokasian dana investasi banyak dimanfaatkan dalam beberapa kegiatan produktif perekonomian. Kegiatan-kegiatan perekonomian yang dipengaruhi, meliputi: Pembukaan lapangan pekerjaan, pengembangan sektor ekspor, dan perubahan struktur perekonomian.¹²

Pengenalan terhadap peran penting FDI dimulai di masa reformasi ekonomi. Deng Xiaoping kembali menjadi aktor sentral di dalam pengenalan konsep ini. FDI adalah

instrumen yang penting di dalam upaya memodernisasi perekonomian Cina yang tertinggal di tahun 1970-an. Di dalam konteks ekonomi politik kontemporer, peran FDI semakin diakui oleh para pimpinan politik di Cina. Salah satu pertimbangan khusus, bahwa FDI merupakan sarana penerimaan teknologi yang cepat dengan dana yang lebih murah.

Pemerintah Cina di masa-masa awal reformasi perekonomian (tahun 1971-1990) memfokuskan perumusan kebijakan perekonomian ke arah pemudahan masuknya dana FDI. Salah satu fokus kebijakannya adalah pemberian insentif bagi pemasukan dana FDI. Selain itu, pemerintah Cina membentuk beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai daerah *piloting* bagi pembangunan.¹³ Penyaluran FDI difokuskan ke beberapa KEK tersebut, yang di antaranya berada di provinsi Guangdong dan Fujian.

Penyaluran FDI di Cina mengalami permasalahan di akhir dekade 1980-an. Permasalahan yang memuncak adalah ketidakmerataan dari penyaluran dana FDI.¹⁴ Daerah *coastal* lebih banyak mendapatkan aliran dana FDI dibandingkan daerah-daerah lain di daratan Cina. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintahan Cina memulai penyaluran dana FDI yang lebih merata ke seluruh daratan Cina. Kegiatan tersebut dimulai di dekade 1990-an.

Selama rentang tahun 1979 hingga tahun 1990, dana FDI yang masuk ke Cina besar. Secara tahunan, nilai dana FDI yang masuk berada di rerata 1.8 triliun Dollar.¹⁵ Nilai rerata ini besar, meskipun para investor masih memiliki rasa ketidakpercayaan kepada Cina.

¹⁰ *ibid*, hlm 9

¹¹ *ibid*, hlm 11

¹² Chunlai Chen, *China's 40 Years of Reform and Development*, ANU Press, hlm 595. Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/j.ctv5cgbnk.37>

¹³ *ibid*, hlm 597

¹⁴ *Loc.cit*

¹⁵ *Loc.cit*

Upaya pendistribusian yang lebih adil dari pengalokasian FDI dimulai di tahun 1992. Pimpinan Cina, yaitu Deng Xiaoping, mengadakan *tour* di daerah selatan Cina.¹⁶ Hal ini merupakan pertanda, bahwa pemerintah Cina berkomitmen untuk menjadikan pertumbuhan perekonomian lebih merata.

Preferensi daerah penerima FDI mengalami *adjustment* setelah tahun 1992. Daerah-daerah lokal Cina lebih diutamakan. Selain itu, terdapat lebih banyak kota yang menjadi preferensi penerimaan bagi dana FDI. Terdapat 52 kota yang menjadi preferensi dana FDI; mencakup 14 kota *coastal* dan 15 kota di perbatasan.

Penerimaan dana FDI Cina mengalami puncak di dekade 1990-an. Di tahun 1993, dana FDI yang masuk sebesar 11 miliar Dollar, dan merupakan kelipatan dari tahun sebelumnya.¹⁷ Di tahun 1994, dana FDI yang masuk sebesar 27 miliar Dollar. Penerimaan dana FDI ke Cina terus mengalami kenaikan hingga tahun 1997. Meski demikian, penurunan terjadi di tahun 1997 hingga tahun 2000-an awal. Dalam hal ini, terjadinya krisis finansial di tahun 1997 berdampak besar terhadap kestabilan aliran dana FDI di Cina. Selain itu, regional Asia Tenggara yang penting bagi aktivitas investor Cina juga terdampak besar.

Adjustment terhadap regulasi FDI kembali terjadi menyusul bergabungnya Cina ke WTO. Perubahan dilakukan agar Cina memenuhi persyaratan yang ditekankan oleh WTO. Perubahan yang dilakukan tersebut meningkatkan nilai FDI yang masuk ke Cina.

Beberapa perubahan yang dilakukan berkaitan dengan peraturan

yang mengatur korporasi. Salah satunya adalah pengesahan dari *New Company Law*. Secara sederhana, peraturan baru ini menyederhanakan persyaratan pendirian perusahaan, sekaligus penyederhanaan regulasi *shareholders*.¹⁸ Peraturan *New Company Law* disahkan di tahun 2005. Selain itu, juga terdapat peraturan *Anti-monopoly Law* yang disahkan di tahun 2007.¹⁹ Peraturan ini disahkan setelah sepuluh tahun proses *drafting*.

Arus FDI yang masuk ke Cina pascabergabung dengan WTO lebih besar dari masa sebelumnya. Dari rentang tahun 2001 hingga tahun 2008, terdapat kenaikan dari total dana FDI yang masuk.²⁰ Di tahun 2001, dana FDI masuk sebesar 46.9 miliar Dollar. Sementara itu, di tahun 2008, dana FDI masuk sebesar 108.3 miliar Dollar. Krisis yang terjadi di tahun 2008 mengurangi total dana FDI yang masuk. Namun, krisis hanya berdampak selama satu tahun fiskal, yaitu di tahun 2009.²¹ Total dana FDI yang masuk kembali mengalami *recovery* di tahun 2010, yaitu sebesar 114.7 miliar Dollar.

4. Soft Power Sebagai Instrumen Perluasan Pengaruh Cina

Perkembangan dari perpolitikan dunia menjadikan Cina sebagai salah satu aktor yang penting. Penekanan atas retorika ini terjadi di tahun 2017. Pertemuan *World Economic Forum* di Davos, Swiss, menjadi salah satu mimbar politik yang dihadiri oleh pemimpin Xi Jinping pada tahun itu. Pemimpin Cina, Xi Jinping, melalui forum tersebut menekankan pentingnya untuk menjaga perdagangan yang telah terglobalisasi. Pernyataan ini dianggap

¹⁸ *Loc.cit*

¹⁹ *Loc.cit*

²⁰ *ibid*, hlm 600

²¹ *Loc.cit*

¹⁶ *ibid*, hlm 598

¹⁷ *Loc.cit*

sebagai salah satu respon Cina terhadap kemenangan Donald Trump di pemilihan umum 2016 di Amerika Serikat.

Tidak ada perubahan berarti dari penganggaran domestik Cina pasca pernyataan Xi Jinping tersebut. Anggaran ekonomi dan militer Cina tidak mengalami perubahan berarti. Meski demikian, Kalimuddin dan Anderson menegaskan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang posisi Cina dewasa ini. Dalam pandangan mereka, Cina telah memperkuat basis terhadap *soft power* mereka.²²

Konsep *soft power* bukan hal yang baru dikenali di perpolitikan luar negeri Cina. Mantan pemimpin Cina, yaitu Hu Jintao, pertama kali memperkenalkan konsep tersebut di tahun 2006. Konsep tersebut mengalami perkembangan yang pesat di masa kekuasaan Xi Jinping. Secara konsep politik Cina, *soft power* dinilai penting untuk mewujudkan tujuan *China's Dream*.²³ Tujuan tersebut memiliki sasaran utama, yaitu mengembalikan kejayaan masyarakat Cina.

Penekanan tentang posisi penting dari *soft power* juga ditekankan di Kongres Partai Komunis Cina ke-19 di tahun 2017. Dalam kesimpulan akhir, pemimpin Cina Xi Jinping menegaskan suatu komitmen tentang arah pembangunan negara Cina. Komitmen tersebut adalah mengembalikan posisi politik Cina di perpolitikan dunia dengan cara menyebarkan lebih banyak pengaruh. Dalam hal ini, posisi Amerika Serikat di tahun 2017 diperkirakan menjadi salah satu penyebab dari komitmen tersebut.

²² Kalimuddin, M. dan Anderson, D. A. 2018 "Soft Power in China's Security Strategy", *Strategic Studies Quarterly*, 12(3), hlm 115

²³ *ibid*, hlm 116

Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump yang cenderung isolasionis. Cina merupakan salah satu kandidat kuat untuk menggantikan posisi sentral Amerika Serikat. Namun, Cina hanya memiliki elemen *soft power* yang kuat.

Pemimpin Cina Xi Jinping memberi arahan baru terhadap instrumen *soft power* Cina. Sektor ekonomi menjadi instrumen terbaru dalam upaya Cina menyebarkan lebih banyak pengaruh ke dunia internasional. BRI adalah bentuk implementasi dari ide tersebut. Salah satu tujuan dari BRI, yaitu menjadi koridor penyaluran barang-barang ekspor dari Cina ke berbagai negara-negara dunia.²⁴ Di tahun 2017, terdapat 60 negara yang telah menandatangani pernyataan untuk ikut bagian dari proyek BRI tersebut.

Kebudayaan adalah instrumen lain bagi penyebaran pengaruh Cina ke dunia internasional. Salah satu sektor yang ditekankan adalah pendidikan. Cina memfokuskan kepada program pertukaran pelajar dan program pembelajaran bahasa Mandarin.²⁵ Salah satu institusi pendidikan yang membantu upaya penyebaran pengaruh Cina adalah *Confucius Institute*.

Sektor jurnalistik juga menjadi salah satu bidang yang dimanfaatkan oleh pemerintah Cina untuk menyebarkan pengaruhnya. *Xinhua Net* adalah kantor berita milik pemerintah Cina yang telah memiliki agensi perwakilan di 160 negara. Selain itu, pemerintah Cina juga mengadakan pelatihan jurnalistik bagi jurnalis dari

²⁴ Biswas, A. K. dan Hartley, K. 2017. China's Soft Power Struggle. *Policy Forum* [Internet] Tersedia di: https://www.researchgate.net/profile/Asit_Biswas/publication/320961581_China's_soft_power_struggles/links/5a04b49c0f7e9bc4078ecc5e/Chinas-soft-power-struggles.pdf (Diakses pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 13.50 WIB)

²⁵ *Loc.cit*

berbagai regional, seperti Asia dan Afrika. Di bidang jurnalistik ini, fokus dari pemerintah Cina adalah menyebarkan pemberitaan yang membangun citra positif bagi Cina.²⁶

B. Hubungan Diplomasi dan Ekonomi antara Kamboja dan Cina

1. Perubahan Posisi Cina dalam Hubungan dengan Kamboja

Cina adalah salah satu negara yang berperan di dalam upaya rekonsiliasi negara Kamboja di dekade 1990-an. Salah satu peran vital Cina, yaitu sebagai salah satu aktor yang mendorong tercapainya *Paris Agreement* di tahun 1990. Penandatanganan perjanjian tersebut menandakan akhir bagi perselisihan yang terjadi di Kamboja secara formal. Lebih dari itu, Cina juga dipandang sebagai salah satu aktor yang mendorong Kamboja untuk ikut menintegrasikan perekonomiannya dengan perdagangan internasional.

Pandangan publik Kamboja secara umum terhadap kehadiran Cina di *Paris Agreement* belum sepenuhnya positif.²⁷ Posisi Cina yang mendukung KR dengan berbagai bantuan ekonomi dan militer adalah faktor yang memicu pandangan negatif tersebut. Menanggapi pandangan negatif dari publik Kamboja tersebut, pihak Cina mengubah posisinya. Cina mengurangi bantuan militer terhadap KR. Posisi Cina yang *anti-Khmer Rouge* ini merupakan momentum awal dari peningkatan hubungan Cina-Kamboja menjelang milenial baru.

Kamboja tetap memandang Cina sebagai salah satu rekan negara yang

penting. Seperti yang dijelaskan Kosal, terdapat beberapa poin penting dari pandangan Kamboja terhadap keberadaan Cina.²⁸ Poin pertama, bahwa Kamboja memandang Cina sebagai salah satu aktor yang membantu proses rekonsiliasi. Poin kedua, bahwa Kamboja memandang Cina sebagai rekan penting pasca peristiwa *coup* yang terjadi di bulan Juli tahun 1997. Setelah peristiwa tersebut, Cina adalah salah satu negara yang masih memberi dukungan terhadap kedaulatan pemerintahan Kamboja. Poin ketiga, bahwa Kamboja memandang Cina sebagai rekan dengan potensi ekonomi dan militer yang kuat.

Peristiwa *coup* pada bulan Juli tahun 1997 menempatkan Cina sebagai salah satu negara terdepan yang membantu Kamboja. Peristiwa *coup* tersebut menempatkan Kamboja berada di posisi yang sulit sebab dikucilkan oleh komunitas internasional. Akan tetapi, Cina memberi perlakuan yang berbeda.

Cina memberi Kamboja beberapa kemudahan, terutama dalam akses bantuan ekonomi yang diperlukan oleh negara pascaperang tersebut. Cina merupakan negara pendonor utama bagi Kamboja yang diisolasi oleh komunitas internasional.²⁹ Pasca tahun 1997, aktivitas ekonomi dari para pengusaha Cina banyak dilakukan di Kamboja. Padahal, di negara Kamboja sendiri, banyak pengusaha keturunan Cina yang terlebih dahulu menjadi penggerak perekonomian dari negara tersebut.

Peran Cina dalam memberikan bantuan ekonomi ke Kamboja di dekade 1990-an terbilang besar. Berdasarkan data dari *The Council for Development of Cambodia* (CDC) yang dikutip oleh Kosal, bahwa Cina memberikan total

²⁶ *Loc.cit*

²⁷ Kosal, L. (2009), *Sino-Cambodia Relations* (CICP Working Paper No. 28), *Cambodian Institute for Cooperation and Peace* (CICP), Phnom Penh, hlm 6

²⁸ *ibid*, hlm 5

²⁹ *ibid*, hlm 6

sumbangan dana sebesar 46 juta Dollar dari rentang tahun 1992-1998. Dalam hal bantuan ini, Cina tidak mensyaratkan spesifikasi tertentu, seperti keharusan transparansi dan *good governing* yang lazim dilakukan oleh pendonor dari Barat.³⁰ Dalam pandangan Kamboja, bantuan dari Cina tersebut sangat penting. Pasca-*coup* di tahun 1997, negara-negara Barat mengurangi jumlah donornya ke Kamboja. Dengan kedatangan dana bantuan dari Cina yang tidak disertai prasyarat apapun, hal tersebut justru membantu penguatan hubungan antara Cina dan Kamboja.

Hubungan antara Cina dengan Kamboja terus mengalami peningkatan di dekade 2000-an. Salah satu even penting dari hubungan kedua negara di dekade 2000-an, yaitu kunjungan Wakil Perdana Menteri Cina Wu Yi di tahun 2004. Melalui kunjungan resmi tersebut, Pemerintah Cina mengumumkan untuk meningkatkan nilai volume perdagangan antara kedua negara.³¹ Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan volume perdagangan sebesar 500 juta Dollar di tahun 2005. Target tersebut lebih besar dibandingkan volume dagang yang dicatatkan di tahun 2003, yaitu sebesar 320 juta Dollar.

2. Prinsip Politik Luar Negeri Cina

Cina adalah sebuah *rising superpower*, namun tidak dibarengi dengan dukungan dari banyak negara-negara lain. Ciorciari menjelaskan bahwa Cina tidak memiliki aliansi yang dalam dengan negara-negara di dunia. Ketiadaan tersebut menghalangi agenda Cina di dalam perluasan pengaruhnya, terutama di daerah Asia-Pasifik. Di sisi lain, Cina menghadapi resistensi dari

aliansi AS yang lebih mapan. Dengan demikian, Cina memerlukan sebuah negara yang bisa membantunya secara diplomasi ketika dibutuhkan.

Posisi Cina sebagai *rising superpower* belum mendapat tanggapan yang positif dari beberapa negara tetangga, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Kecurigaan terhadap Cina merupakan residu dari pengalaman selama Perang Dingin. Cina identik sebagai pemberi bantuan dan dana bagi komunitas-komunitas Komunis selama periode Perang Dingin.³² Selain itu, AS kembali menjadi *superpower* lain yang menghalangi agenda perluasan pengaruh bagi Cina. Terkhusus di negara-negara Asia Tenggara, AS lebih disukai sebab dipandang tidak mengancam dan lebih familiar terhadap agenda diplomasi masing-masing negara.

Pemerintah Cina dipandang lebih mementingkan aspek kedaulatan dan *noninterference* sebagai media untuk membangun relasi. Disebabkan oleh aspek-aspek tersebut, Cina tidak memiliki kehendak untuk memaksa negara-negara yang memutuskan beraliansi dengan Cina untuk mendukung Cina dalam isu-isu besar. Salah satu isu besar yang tidak dipaksakan *patronage*-nya oleh Cina adalah isu tentang status Taiwan. Disebabkan oleh aspek-aspek yang difokuskan oleh Cina, maka sektor perekonomian menjadi salah satu media yang digunakan.

C. Pendekatan Kamboja – Cina Secara Politik

1. Kamboja Pasca Pemilu 2003

Kamboja merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan

³⁰ *ibid*, hlm 9

³¹ *ibid*, hlm 10

³² Ciorciari, J. D. 2014, "A Chinese Model for Patron-Client Relations? The Sino-Cambodian Relationship", *International Relations of the Asia Pacific*, 15, hlm 249

perekonomian yang baik di semenjak tahun 2000. Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, rekonsiliasi perpolitikan yang terjadi di Kamboja memberi kesempatan bagi negara tersebut untuk membuka perekonomiannya ke dunia luar. Meski demikian, keadaan perpolitikan di Kamboja tetap berada di tahapan yang *turmoil*.

Salah satu pemilihan umum yang diadakan di Kamboja pasca rekonsiliasi adalah pemilihan umum tahun 2003. Hasil dari pemilihan umum tahun 2003, CPP menjadi pemenang. Meski demikian, partai-partai oposisi tidak menerima hasil dari pemilihan tersebut. Salah satu partai oposisi terbesar, yaitu Funcipec, menentang hasil dari pemilihan umum tahun 2003.

Partai Funcipec tetap memainkan peranan besar di perpolitikan Kamboja. Mereka mengendalikan administrasi negara Kamboja. Meski kalah dari CPP di pemilihan umum tahun 2003, tetapi mereka tetap mempertahankan pengaruh di bagian administrasi negara. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Funcipec untuk menentang rezim CPP, yaitu melakukan tindakan boikot terhadap setiap pertemuan menteri.³³

Permasalahan di pemilihan umum tahun 2003 dan ketegangan politik yang dihasilkan setelahnya juga mencakup beberapa isu penting lainnya. Salah satu isu yang terdampak dari ketegangan tersebut adalah penundaan proses bergabungnya Kamboja ke WTO.³⁴ Selain itu, berbagai isu dalam negeri Kamboja menjadi bahan bagi partai-partai oposisi CPP untuk membakar isu. Salah satunya adalah isu pembunuhan ketua *Trade Union*

Kamboja masa itu, yaitu Chea Vichea.³⁵ Partai-partai oposisi segera menyalahkan dan menuduh CPP sebagai dalang di balik kasus tersebut.

Raja Kamboja, yaitu Norodom Sihanouk, mengumumkan pengunduran diri di tahun 2004. Meski demikian, banyak kalangan yang memandang bahwa pengunduran diri Norodom Sihanouk tidak lepas dari pengaruh intervensi politik³⁶. Selain itu, proses pengunduran diri Norodom Sihanouk dilakukan dengan tergesa-gesa. Di konstitusi Kamboja, tidak ada aturan legal tentang penurunan tahta seorang raja. Meski demikian, lembaga legislatif Kamboja mengadakan pertemuan, dan menyegerakan pembentukan aturan legal yang dimaksud agar Norodom Sihanouk dapat segera turun tahta.

Performa perekonomian Kamboja di tahun 2004 tetap baik meski terdapat banyak ketegangan politik. Menurut perkiraan *International Monetary Fund* (IMF), nilai pertumbuhan GDP Kamboja di tahun 2004 sebesar 4 hingga 4.5 persen.³⁷ Meski demikian, nilai pertumbuhan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang memengaruhi, yaitu tekanan kebijakan moneter IMF yang ketat dan tingkat kepercayaan investor yang rendah.

Berhubungan dengan tingkat kepercayaan investor yang rendah, budaya korupsi menjadi permasalahan utama. Berdasarkan laporan Bank Dunia, sebanyak 75 persen dari total pengusaha di Kamboja melaporkan keberadaan praktik penyuapan.³⁸ Diperkirakan bahwa jumlah uang suap senilai dengan 5.2 persen dari total penerimaan negara.

³³ Beresford, M. 2005, "Cambodia in 2004: An Artificial Democratization Process", *Asian Survey*, 45(1), hlm 134

³⁴ *ibid*, hlm 135

³⁵ *Loc.cit*

³⁶ *ibid*, hlm 136

³⁷ *ibid*, hlm 138

³⁸ *Loc.cit*

Proses bergabungnya Kamboja ke WTO diperkirakan akan membawa dampak yang buruk terhadap perekonomian Kamboja.³⁹ Alasan utama di balik perkiraan ini, bahwa akses terhadap pasar bebas merupakan ancaman bagi perekonomian Kamboja. Pandangan sinis menganggap bahwa Kamboja belum siap bersaing di persaingan global yang ketat.

2. Cambodia's People Party Sebagai Partai Utama Kamboja

Tahun 2012 merupakan salah satu momen penting dalam perkembangan demokrasi di Kamboja. Meski merupakan momen bersejarah, tetapi hasil dari pemilihan umum *communal councils* dapat diprediksi. CPP kembali menjadi pemenang, dan menguasai 97 persen kursi *communal councils*.⁴⁰ Partai-partai oposisi berada di urutan-urutan setelahnya dengan selisih yang jauh berbeda. Kemenangan CPP di pemilihan umum tahun 2012 merupakan penegasan atas kekuasaan Hun Sen.

Salah satu faktor kemenangan dari CPP adalah kemampuan dari partai politik tersebut dalam memenuhi kepuasan konstituensi.⁴¹ Penduduk daerah pedesaan, secara umum, merasa puas dengan peningkatan taraf kesejahteraan selama CPP berkuasa. Selain itu, CPP berhasil memuaskan unsur konstituensi dari kalangan pekerja. Dengan memanfaatkan mekanisme yang menguntungkan bagi ekspor komoditas garmen Kamboja, seperti pemanfaatan preferensi dagang dari AS dan UE, CPP meningkatkan kebutuhan gaji kalangan buruh.

Kemenangan besar CPP di pemilihan umum tahun 2012 juga disebabkan oleh keberhasilan rezim di dalam membangun perekonomian Kamboja. Peningkatan perekonomian di Kamboja didukung oleh kestabilan politik nasional yang dicapai di bawah kepemimpinan CPP. Berbagai pencapaian yang digapai oleh rezim CPP menyebabkan partai-partai oposisi kehilangan banyak poin-poin serangan terhadap rezim.

Pertumbuhan ekonomi Kamboja di tahun 2012 mencapai angka 6.6 persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 salah satunya didorong oleh kontribusi dari sektor industri garmen. Sektor industri garmen menyerap banyak tenaga kerja dengan akumulasi sebesar 400.000 pekerja.⁴² Besarnya skala ekonomi dari sektor industri garmen berhasil menyumbangkan empat miliar Dollar dari total tiga belas miliar Dollar pemasukan bagi Kamboja di tahun 2012.

Persaingan antara CPP dengan partai oposisi kembali memuncak di tahun 2015. Rezim Perdana Menteri Hun Sen dari CPP berupaya untuk menangkap dan menahan figur-figur lawan politik.⁴³ Tindakan agresif dari rezim CPP dipandang sebagai salah satu cara untuk kembali memenangkan pemilihan umum yang akan kembali diadakan di tahun 2018. Sementara itu, bagi pihak oposisi, satu-satunya jalan untuk memberikan perlawanan adalah melakukan pemboikotan terhadap lembaga legislatif.

Hun Sen dipandang menggunakan taktik *divide and conquer* untuk melemahkan soliditas partai

³⁹ *Loc.cit*

⁴⁰ Un, K. 2013, "Cambodia in 2012: Beyond the Crossroads?", *Asian Survey*, 53(1), hlm 143

⁴¹ *ibid*, hlm 144

⁴² *Loc.cit*

⁴³ O'Neill D. C., 2016, "Cambodia in 2016: A Tightening Authoritarian Grip", *Asian Survey*, 57(1), hlm 180

oposisi.⁴⁴ Dalam hal ini, Hun Sen berhasil mencapai tujuannya. Beberapa figur dari partai oposisi mengalami perpecahan. Di antaranya kembali meminta pengampunan kepada pemerintahan Kamboja. Taktik dari Hun Sen ini memperkuat dominasi CPP di perpolitikan Kamboja.

3. Penguatan Hubungan Kamboja – Cina

Cina adalah salah satu sekutu penting bagi Kamboja. Hubungan antara Kamboja dan Cina tetap solid di tahun 2016. Posisi Kamboja membantu Cina di permasalahan konflik LCS sehingga ASEAN gagal merumuskan suatu keputusan bersama menghadapi tuntutan Cina tentang Laut Cina Selatan. Dalam hal ini, Kamboja mendukung usulan dari Cina, bahwa permasalahan Laut Cina Selatan semestinya diselesaikan secara bilateral, atau antarnegara *claimant*.⁴⁵ Disebabkan oleh posisi Kamboja yang mendukung Cina, Perdana Menteri Hun Sen menyatakan bahwa pemerintah Cina menyetujui pemberian dana bantuan sebesar 600 juta Dollar.⁴⁶

Hubungan bilateral antara Kamboja dengan Cina terus mengalami peningkatan di tahun 2016. Setelah pimpinan Cina, yaitu Xin Jinping, mengunjungi Kamboja, banyak kesepakatan perekonomian yang dihasilkan. Beberapa dari kesepakatan perekonomian tersebut, mencakup: Pinjaman dana sebesar 240 juta Dollar, pembatalan utang luar negeri Kamboja terhadap Cina sebesar 90 juta Dollar, dan pemberian dana bantuan militer sebesar 14 juta Dollar.⁴⁷

Tren perdagangan Kamboja di tahun 2016 ditandai dengan dua pola.

Pertama, nilai perdagangan antara Kamboja dengan Cina mengalami peningkatan dan mencapai angka 2.34 miliar Dollar. Meski demikian, pertumbuhan tersebut didominasi oleh nilai ekspor Cina ke Kamboja.⁴⁸ Kedua, meski memiliki ikatan yang erat dengan Cina, mitra ekspor terbesar Kamboja justru adalah Amerika Serikat.⁴⁹ Nilai perdagangan ekspor Kamboja ke Amerika Serikat di tahun 2016 mencapai dua miliar Dollar.

Pemilihan umum tahun 2018 adalah puncak dari upaya monopolisasi kekuasaan oleh CPP. Sistem legislasi Kamboja yang bikameral dikuasai sepenuhnya oleh CPP.⁵⁰ Semua kursi yang tersedia di masing-masing kamar legislatif dikuasai oleh CPP. Sembilan belas partai politik lainnya yang turut ikut serta, mereka tidak mendapatkan satu kursi pun.

Perdana Menteri Hun Sen turut melanggengkan praktik nepotisme yang ada di Kamboja.⁵¹ Beberapa dari anggota keluarganya diangkat oleh Hun Sen sendiri untuk mengisi beberapa pos di pemerintahan. Beberapa anggota keluarga yang diangkat, meliputi: Hun Manith (anak ketiga Hun Sen) sebagai kepala departemen pelatihan anti terorisme; Hun Manet (anak tertua Hun Sen) sebagai kepala staff gabungan militer, Dy Viceha (anak tiri Hun Sen) sebagai deputi kepala kepolisian Kamboja.

CPP dituduh menjadikan pemilihan tahun 2018 menjadi tidak adil dan tidak transparan. Salah satu poin pendukung tuduhan tersebut, bahwa CPP dituduh mengarahkan arah pilihan

⁴⁴ *ibid*, hlm 182

⁴⁵ *ibid*, hlm 184

⁴⁶ *Loc.cit*

⁴⁷ *Loc.cit*

⁴⁸ *Loc.cit*

⁴⁹ *Loc.cit*

⁵⁰ Peou, S. 2019, "Cambodia In 2018: A Year of Setback and Successes", *Southeast Asian Affairs*, hlm 106

⁵¹ *ibid*, hlm 106-107

para calon pemilih agar menguntungkan bagi keberlangsungan rezim CPP.⁵² Selain itu, badan kehakiman Kamboja dipandang tidak bebas dari intervensi badan eksekutif.⁵³ Pelarangan partai oposisi terbesar, yaitu *Cambodia National Rescue Party* (CNRP), dari mengikuti prosesi pemilihan umum tahun 2018 adalah hasil keputusan badan kehakiman.

4. Catatan Ekonomi Kamboja – Cina Sejak Tahun 2017

Bidang perekonomian Kamboja tidak mengalami penurunan performa di tahun 2018, meski terdapat ketegangan di aspek politik. Di tahun 2018, diperkirakan bahwa pertumbuhan perekonomian Kamboja mencapai angka tujuh persen. Sementara itu, angka pertumbuhan perekonomian Kamboja dari tahun 1995 hingga tahun 2017 berada di kisaran angka 7.7 persen.⁵⁴ Kamboja merupakan negara dengan nilai pertumbuhan perekonomian tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Lebih lanjut, jika pertumbuhan perekonomian Kamboja dapat dipertahankan di nilai tujuh persen per tahun, maka Kamboja diperkirakan akan menjadi negara *high-income country* di tahun 2030.

Posisi *balance of trade* antara Kamboja dan Cina masih timpang di tahun 2017. Nilai ekspor Kamboja ke Cina terbilang sangat kecil. Dari data ekspor rentang bulan Januari hingga November 2017, Kamboja hanya mencatatkan nilai ekspor sebesar 634 juta Dollar ke Cina.⁵⁵ Sebaliknya, nilai impor Kamboja dari Cina sangat kontras. Selama tahun 2017, Kamboja mencatatkan nilai impor sebesar 4.48

miliar Dollar.⁵⁶ Nilai impor Kamboja dari Cina di tahun 2017 bahkan lebih besar dibandingkan nilai impor Kamboja dari Cina di tahun 2016.

Cina adalah donor dan investor terbesar bagi Kamboja di tahun 2017. Total dana yang diberikan oleh Cina kepada Kamboja mencapai 4.2 miliar Dollar.⁵⁷ Di sisi investasi, dana yang berasal dari Cina membantu Kamboja di dalam pengembangan daerah *real estate*.

Daftar Pustaka

- Ciorciari, J. D. 2014. "A Chinese Model for Patron-Client Relations? The Sino-Cambodian Relationship". *International Relations of the Asia Pacific*. 15. Hlm 245 – 278
- Beresford, M. 2005. "Cambodia in 2004: An Artificial Democratization Process". *Asian Survey*. 45(1). Hlm 134 – 139
- Un, K. 2013. "Cambodia in 2012: Beyond the Crossroads?". *Asian Survey*. 53(1). Hlm 142 – 149
- O'Neill D. C. 2016 "Cambodia in 2016: A Tightening Authoritarian Grip". *Asian Survey*. 57(1). Hlm 180 – 186
- Peou, S. 2019. "Cambodia In 2018: A Year of Setback and Successes". *Southeast Asian Affairs*. Hlm 105 – 120
- Kalimuddin, M. dan Anderson, D. A. 2018 "Soft Power in China's Security Strategy". *Strategic Studies Quarterly*. 12(3). Hlm 114 – 141

⁵² *ibid*, hlm 108

⁵³ *Loc.cit*

⁵⁴ *ibid*, hlm 110

⁵⁵ *ibid*, hlm 112

⁵⁶ *Loc.cit*

⁵⁷ *Loc.cit*

- Msingathi, S. 2016. *Determinants of Economic Growth In China: 1978-2013*. Master. Port Elizabeth: Nelson Mandela Metropolitan University
- Yuhang, P. 2018. *Trade Openness, Pollution, and Growth: Evidence from China 1998-2008*. Master. Hong Kong: Hong Kong University of Science and Technology
- Marcelo Alejandro Sarzosa, L. 2012. *Dumping And A State Economy: Is China's Anti-Dumping Retaliation Is Justified Under The WTO Framework?*. Master. Santiago: Universidad de Chile
- Chen, C. *China's 40 Years of Reform and Development*. ANU Press. Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/j.ctv5cgbnk.37>
- Biswas, A. K. dan Hartley, K. 2017. *China's Soft Power Struggle*. Policy Forum [Internet] Tersedia di: https://www.researchgate.net/profile/Asit_Biswas/publication/320961581_China's_soft_power_struggles/links/5a04b49c0f7e9bc4078ecc5e/Chinas-soft-power-struggles.pdf
- Kosal, L. (2009). *Sino-Cambodia Relations* (CICP Working Paper No. 28). *Cambodian Institute for Cooperation and Peace* (CICP). Phnom Penh